SOCILEXIA
Journal of Social Sciences and Humanities

SOCILEXIA: Journal of Social Sciences and Humanities
Vol. 1, No. 4, 2026
E-ISSN: 3164-9610
punggawajournal.com/socilexia

Otoritas Pengetahuan dalam Dua Karya Ibn Rushd: Kepemimpinan, Penafsiran Hukum Agama, dan Akuntabilitas Demokratis

Alin Alyani[1]
[1] Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia
Korespondensi: 253507111003@student.unsil.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Oct 2th, 2026
Revised Nov 15th, 2026
Accepted Nov 22th, 2026

Keyword:
Ibn Rushd; *epistemic authority*; Political leadership; Legal interpretation; Democratic accountability.

ABSTRAK

This article examined the relationship between *epistemic authority* and political power in Ibn Rushd's thought through a reading of *Averroes on Plato's Republic* and *The Decisive Treatise*. The study employed qualitative *library research*, historical reading, and textual interpretation. The analysis showed that Ibn Rushd treated demonstrative knowledge and moral virtue as important elements of political leadership. In *The Decisive Treatise*, he also distinguished human capacities to understand truth through demonstrative, dialectical, and rhetorical methods. Reading the two works together revealed a connection between intellectual virtue, leadership, and the authority to interpret religious law. However, the texts did not formulate institutional mechanisms through which society could hold rulers accountable. The article concluded that expertise is necessary in government, but it must be accompanied by participation, transparency, and democratic accountability.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan merupakan persoalan mendasar dalam kehidupan politik. Kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang atau kelompok untuk memerintah, tetapi juga menyangkut alasan dan pengetahuan yang digunakan untuk menentukan keputusan publik. Dalam pemerintahan, pengetahuan dibutuhkan untuk mengenali persoalan, menilai pilihan kebijakan, dan memperkirakan akibat keputusan. Namun, keunggulan pengetahuan juga menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang berhak menentukan kepentingan bersama dan bagaimana kewenangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan itu telah muncul dalam sejarah pemikiran politik jauh sebelum berkembangnya demokrasi modern. Salah satu pemikir yang membahas hubungan antara kebijaksanaan, kewenangan, dan pemerintahan adalah Ibn Rushd (1126–1198), filsuf, ahli hukum, dan dokter dari Andalusia. Ia hidup pada masa Dinasti Almohad dan terlibat dalam lingkungan intelektual serta pemerintahan. Karya-karyanya memperlihatkan perhatian pada hubungan antara filsafat, hukum agama, dan kehidupan politik (Ben Ahmed & Pasnau, 2025; Omar, 2019).

Dalam parafrasenya terhadap *Republic* karya Plato, yang dikenal melalui edisi *Averroes on Plato's Republic*, Ibn Rushd membahas negara utama, tujuan kehidupan politik, serta kualitas pemimpin. Kepemimpinan tidak cukup didasarkan pada kedudukan atau kemampuan memerintah. Pemimpin juga memerlukan pengetahuan dan keutamaan moral agar kekuasaan diarahkan pada kehidupan bersama (Aiat Tazeroulat, 2025; Averroes, 1974; Orwin, 2022). Melkebeek (2021) menambahkan bahwa pembacaan Ibn Rushd atas *Republic* juga memperhatikan kapasitas perempuan untuk menjadi penjaga, filsuf, dan pemimpin.

Persoalan otoritas pengetahuan juga tampak dalam *The Decisive Treatise*. Dalam karya ini, Ibn Rushd membahas hubungan antara filsafat dan hukum agama serta kedudukan penalaran demonstratif dalam memahami kebenaran. Ia berpendapat bahwa penggunaan akal dan filsafat tidak bertentangan

dengan agama. Pada saat yang sama, ia mengakui perbedaan kemampuan manusia dalam memahami dan menerima pengetahuan melalui metode demonstratif, dialektis, dan retoris (Ahsan, 2025; Averroes, 2001; Wahyuddin et al., 2026).

Perbedaan kapasitas tersebut menimbulkan persoalan politik. Jika sebagian orang dianggap memiliki kemampuan lebih tinggi untuk memahami kebenaran, bagaimana kedudukan mereka dalam penafsiran hukum dan pengambilan keputusan yang memengaruhi masyarakat? Pengetahuan dapat membantu pemerintahan mengambil keputusan yang lebih baik, tetapi penempatan ahli pada posisi istimewa juga dapat mengurangi ruang warga untuk menilai dan mengoreksi keputusan. Perdebatan kontemporer tentang keahlian dalam pemerintahan menunjukkan bahwa kompetensi ahli perlu dipertimbangkan bersama legitimasi demokratis dan mekanisme pengawasan (Da Silva, 2026; Head, 2024; Holst, 2025; Holst & Christensen, 2024).

Kajian tentang pemikiran politik Ibn Rushd telah berkembang melalui beberapa jalur. Omar (2019) membaca *The Decisive Treatise* sebagai bagian dari gagasan reformasi politik dan persoalan otoritas. Siraj dan Mohd Nor (2020) menghubungkan pemikiran Ibn Rushd dengan kebebasan, rasionalitas, dan gagasan demokrasi. Melkebeek (2021) menelaah pandangannya mengenai posisi dan potensi perempuan dalam komentar atas *Republic*. Orwin (2022) menghimpun pembacaan baru terhadap komentar tersebut, sedangkan Aiat Tazeroulat (2025) membahas pengaruh Plato dalam pemikiran politik Ibn Rushd. Ben Ahmed dan Pasnau (2025) menyediakan sintesis mutakhir mengenai biografi, karya, dan konteks intelektual Ibn Rushd.

Kajian lain memberi perhatian pada hubungan filsafat, agama, dan metode penafsiran. Soleh dan Rahmawati (2023) membahas integrasi agama dan filsafat. Ahsan (2025) menelaah metode penalaran Ibn Rushd, sedangkan Taliaferro (2026) mengkaji pembedaan istilah hukum ilahi dalam *The Decisive Treatise* dan *al-Kashf*. Wahyuddin et al. (2026) menghubungkan *burhān*, bahasa, *taʾwīl*, dan otoritas epistemik, dan Sugara et al. (2026) membahas hubungan agama dan politik dalam filsafatnya. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas pengetahuan telah menjadi perhatian akademik, tetapi belum seluruhnya dibaca bersama persoalan kepemimpinan politik dan akuntabilitas.

Di sisi lain, literatur tentang keahlian dan demokrasi memperlihatkan bahwa otoritas ahli tidak selalu netral atau bebas dari persoalan legitimasi. Holst dan Christensen (2024) membahas kualitas epistemik badan ahli, sedangkan Head (2024) menekankan keterujian dan keterbukaan terhadap perdebatan dalam nasihat kebijakan. Holst (2025) membandingkan pendekatan untuk mendemokratisasi institusi ahli. Schmechtig (2025) membahas batas intervensi paternalistik atas nama pengetahuan, Croce dan Marsili (2025) menunjukkan bahwa kepercayaan kepada ahli dapat salah arah ketika sumbernya tidak andal, dan Da Silva (2026) membahas syarat epistemik bagi otoritas politik yang sah.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijaksanaan, kepemimpinan, dan penafsiran hukum dalam pemikiran Ibn Rushd bukan tema yang sepenuhnya baru. Karena itu, artikel ini tidak mengklaim sebagai kajian pertama. Kebaruan yang ditawarkan terletak pada pembacaan berdampingan atas dua karya dengan fokus berbeda: kepemimpinan dan negara dalam *Averroes on Plato's Republic*, serta penalaran dan penafsiran hukum dalam *The Decisive Treatise*. Pembacaan ini kemudian digunakan untuk menilai hubungan antara keutamaan intelektual, kewenangan, dan batas pertanggungjawaban kekuasaan.

Dalam artikel ini, otoritas pengetahuan (*epistemic authority*) dipahami sebagai kedudukan seseorang atau kelompok yang dipandang memiliki kompetensi untuk memberi alasan atau penilaian berdasarkan penguasaan pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, keahlian dokter di bidang kesehatan atau insinyur di bidang pembangunan adalah contohnya. Otoritas ini perlu dibedakan dari kewenangan politik untuk membuat keputusan yang mengikat masyarakat. Kompetensi dapat menjadi alasan untuk mendengar pertimbangan seorang ahli, tetapi tidak dengan sendirinya memberi hak untuk memerintah tanpa pengawasan. Perdebatan kontemporer menegaskan pentingnya menilai kompetensi, keandalan, dan legitimasi kewenangan secara bersamaan (Da Silva, 2026; Holst, 2025).

Konsep *guardianship* digunakan untuk menguji risiko ketika kelompok yang dianggap lebih mengetahui kepentingan bersama diberi kewenangan politik yang lebih besar. Dahl (1989) mengkritik gagasan ini dengan dua alasan. Pertama, pengetahuan tentang kepentingan bersama tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari nilai dan pengalaman orang-orang yang terkena dampak kebijakan. Kedua, kelompok yang dianggap paling mengetahui tetap dapat menyalahgunakan kekuasaan. Karena itu, kesetaraan politik dan kesempatan warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan menjadi unsur

penting demokrasi. Dalam artikel ini, konsep tersebut tidak dipakai untuk menyamakan Ibn Rushd dengan teori Dahl, melainkan untuk membandingkan konsekuensi dari penempatan kelompok berpengetahuan pada posisi yang lebih tinggi. Perdebatan tentang paternalisme epistemik menambahkan bahwa pengarahan atas nama pengetahuan harus dapat dijelaskan dan diuji (Croce & Marsili, 2025; Schmechtig, 2025).

Akuntabilitas dipahami sebagai mekanisme pembatasan penggunaan kekuasaan melalui kewajiban pemegang kewenangan untuk menjelaskan tindakannya dan kemungkinan adanya konsekuensi atau sanksi atas tindakan tersebut (Mechkova et al., 2019). Analisis menggunakan tiga dimensi. Akuntabilitas vertikal berkaitan dengan kemampuan warga meminta pertanggungjawaban pejabat, terutama melalui pemilu dan mekanisme partai politik. Akuntabilitas horizontal mengacu pada pengawasan antarlembaga negara, seperti lembaga legislatif dan peradilan, yang dapat membatasi tindakan pemerintah (Mechkova et al., 2019; O'Donnell, 1998). Akuntabilitas diagonal atau sosial (*societal accountability*) menekankan peran masyarakat sipil dan media dalam mengawasi pemerintah serta mendorong pertanggungjawaban (Mechkova et al., 2019; Smulovitz & Peruzzotti, 2000). Penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa pengaturan akuntabilitas sosial dapat memengaruhi persepsi legitimasi warga, sedangkan aturan transparansi belum tentu dirasakan sebagai keterbukaan (Brummel & de Blok, 2024; Trautendorfer & Eder, 2025).

Kerangka ini merupakan konsep politik modern yang tidak dapat dituntut hadir utuh dalam pemikiran seorang filsuf abad pertengahan. Penggunaannya diarahkan untuk mengidentifikasi perbedaan dan keterbatasan pemikiran Ibn Rushd, bukan untuk menyatakan bahwa ia seharusnya merumuskan institusi demokrasi modern.

Berdasarkan uraian dan kerangka konseptual tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana Ibn Rushd menghubungkan pengetahuan dan keutamaan intelektual dengan kepemimpinan dalam *Averroes on Plato's Republic*? Kedua, bagaimana perbedaan kapasitas penalaran dan kewenangan penafsiran dalam *The Decisive Treatise* dapat dibaca dalam kaitannya dengan otoritas politik? Ketiga, apa relevansi dan keterbatasan pemikiran tersebut dalam memahami persoalan otoritas dan akuntabilitas pada demokrasi kontemporer?

Artikel ini berargumen bahwa Ibn Rushd menempatkan pengetahuan dan keutamaan moral sebagai dasar penting dalam menjalankan kekuasaan. Namun, penekanannya pada keutamaan intelektual dan perbedaan kemampuan manusia dalam memahami kebenaran juga memperlihatkan adanya hierarki pengetahuan. Hierarki ini membantu menjelaskan kualitas kepemimpinan, tetapi belum menyediakan mekanisme yang menjamin pertanggungjawaban kekuasaan kepada masyarakat. Karena itu, pemikiran Ibn Rushd perlu dibaca secara kritis melalui prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas demokratis, tanpa menganggapnya sebagai pemikir demokrasi modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan pembacaan historis-interpretatif. Pilihan ini didasarkan pada objek kajian, yaitu pemikiran politik Ibn Rushd yang ditelusuri melalui karya tertulis, konteks sejarah, dan pembacaan akademik atas teks tersebut. Penelitian ini tidak melibatkan responden atau pengumpulan data lapangan.

Sumber Data dan Kriteria Pemilihan Teks

Data penelitian berupa dokumen tertulis. Sumber primer dipilih secara purposif berdasarkan kedekatannya dengan fokus kajian, yaitu *Averroes on Plato's Republic* dalam terjemahan Ralph Lerner (1974) dan *The Book of the Decisive Treatise Determining the Connection Between the Law and Wisdom and the Epistle Dedicatory* dalam terjemahan Charles E. Butterworth (2001). Karya pertama membahas negara dan kepemimpinan, sedangkan karya kedua membahas hubungan filsafat dengan hukum agama, metode penalaran, dan penafsiran.

Sumber sekunder dipilih berdasarkan relevansinya dengan tiga bidang: penelitian tentang politik dan kepemimpinan Ibn Rushd; penelitian tentang filsafat, hukum agama, dan metode penalaran; serta literatur tentang keahlian, demokrasi, dan akuntabilitas. Sumber berupa artikel jurnal ilmiah dan buku akademik, terutama yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir. Literatur di luar sepuluh tahun terakhir dipertahankan secara terbatas ketika diperlukan sebagai sumber primer atau rujukan teori yang mendasar, yaitu dua karya Ibn Rushd yang menjadi objek kajian, Dahl (1989) untuk kritik terhadap *guardianship*, serta O'Donnell (1998) dan Smulovitz dan Peruzzotti (2000) untuk konsep akuntabilitas horizontal dan sosial (*societal accountability*).

Tahapan Analisis

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, pembacaan dekat terhadap dua karya primer untuk mengidentifikasi gagasan tentang kepemimpinan, pengetahuan, metode penalaran, dan penafsiran. Kedua, penempatan gagasan tersebut dalam konteks sosial-politik Andalusia pada masa Dinasti Almohad dengan bantuan sumber sekunder. Ketiga, perbandingan fokus kedua karya dan penafsiran implikasinya bagi otoritas politik. Keempat, penilaian hasil pembacaan dengan konsep *guardianship* dan akuntabilitas demokratis. Sepanjang analisis, artikel membedakan tiga hal: pernyataan eksplisit Ibn Rushd, hasil interpretasi penulis atas dua teks, dan kritik yang berasal dari teori politik kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi dan Latar Belakang Sosial-Politik Ibn Rushd

Biografi dan Perjalanan Intelektual

Ibn Rushd memiliki nama lengkap Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd. Ia dilahirkan di Cordoba, Andalusia, pada tahun 1126 M dan meninggal di Marrakesh pada tahun 1198 M. Dalam literatur Barat, ia dikenal sebagai Averroes. Ia berasal dari keluarga dengan tradisi kuat dalam hukum Islam; ayah dan kakeknya memegang kedudukan penting dalam lembaga peradilan. Lingkungan ini memengaruhi perkembangan intelektualnya, khususnya dalam ilmu hukum dan keagamaan (Ben Ahmed & Pasnau, 2025; Omar, 2019).

Sejak muda, Ibn Rushd mempelajari hukum Islam, filsafat, kedokteran, logika, dan ilmu pengetahuan alam, sehingga dikenal sebagai filsuf, ahli hukum, sekaligus dokter. Salah satu kontribusinya yang paling dikenal adalah penjelasan dan komentar terhadap karya Aristoteles, yang menjadikannya tokoh penting dalam tradisi filsafat Islam abad pertengahan (Ben Ahmed & Pasnau, 2025; Omar, 2019).

Dalam lingkungan pemerintahan Dinasti Almohad, Ibn Rushd dikenal sebagai hakim dan kemudian memperoleh kedudukan sebagai dokter utama bagi khalifah di Marrakesh. Hubungannya dengan Abu Ya'qub Yusuf dan penguasa Almohad berikutnya memberi ruang bagi aktivitas intelektualnya. Pengalaman sebagai hakim membuatnya memahami langsung hubungan antara hukum, kewenangan, dan pelaksanaan pemerintahan (Ben Ahmed & Pasnau, 2025; Omar, 2019).

Namun, perjalanan intelektualnya tidak selalu mulus. Pada akhir hidupnya, ia mengalami pengasingan dan penurunan kedudukan di tengah perubahan sikap politik dan keagamaan penguasa. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa dukungan penguasa kepada seorang pemikir dapat berubah ketika pandangannya tidak lagi sejalan dengan kepentingan politik yang berkembang (Ben Ahmed & Pasnau, 2025; Omar, 2019).

Kondisi Politik Andalusia pada Masa Ibn Rushd

Pemikiran Ibn Rushd berkembang di Andalusia di bawah Dinasti Almohad. Dinasti ini muncul setelah melemahnya Dinasti Almoravid dan membawa gerakan pembaruan keagamaan yang menekankan pemurnian ajaran Islam. Perubahan kekuasaan ini memengaruhi kehidupan sosial dan intelektual, termasuk hubungan antara filsafat dan otoritas keagamaan (Ben Ahmed & Pasnau, 2025; Omar, 2019).

Pada masa itu, filsafat tidak selalu diterima secara sama. Penalaran rasional dalam menjelaskan persoalan agama sering menimbulkan perdebatan, dan sebagian kalangan memandang filsafat dengan curiga karena dianggap dapat bertentangan dengan pemahaman keagamaan yang telah berkembang. Ibn Rushd berusaha menunjukkan bahwa filsafat dan agama dapat saling mendukung selama keduanya diarahkan pada pencarian kebenaran (Aiat Tazeroulat, 2025; Ben Ahmed & Pasnau, 2025).

Konteks ini membantu menjelaskan perhatian Ibn Rushd pada kedudukan pengetahuan. Perdebatan tentang filsafat pada masa itu tidak hanya menyangkut kegiatan intelektual, tetapi juga siapa yang berwenang menafsirkan ajaran agama dan menentukan pemahaman yang dapat diterima masyarakat. Pengalaman Ibn Rushd sebagai hakim dan keterlibatannya dalam lingkungan istana menunjukkan bahwa persoalan tersebut terkait dengan praktik hukum dan pemerintahan. Hal ini tidak berarti bahwa kedudukan tersebut secara langsung menentukan seluruh isi pemikirannya, tetapi membantu menjelaskan mengapa hubungan antara penalaran, kewenangan hukum, dan otoritas keagamaan menjadi persoalan penting dalam lingkungan intelektual yang membentuknya (Ben Ahmed & Pasnau, 2025; Omar, 2019).

Otoritas Pengetahuan dan Kepemimpinan dalam *Averroes on Plato's Republic*

Kedudukan Teks dan Politik sebagai Ilmu Praktis

Averroes on Plato's Republic bukan terjemahan langsung atas karya Plato, melainkan parafrase atau ringkasan filosofis yang dibuat Ibn Rushd berdasarkan *Republic*. Ibn Rushd mengolah gagasan Plato dengan kerangka yang dipengaruhi tradisi Aristotelian dan persoalan intelektual masanya (Averroes, 1974; Orwin, 2022).

Naskah Arabnya tidak lagi bertahan, dan edisi modern berasal dari tradisi terjemahan Ibrani dan Latin. Karena itu, pembacaan perlu mempertimbangkan sejarah transmisi teks dan pilihan penerjemah. Karya ini tidak dapat dibaca sebagai salinan sederhana pemikiran Plato, tetapi setiap bagiannya juga tidak otomatis mencerminkan pendapat pribadi Ibn Rushd tanpa mempertimbangkan konteks komentarnya (Averroes, 1974; Orwin, 2022).

Karena itu, pembahasan mengenai negara ideal dan kepemimpinan filosofis perlu membedakan gagasan Plato yang menjadi sumber dengan cara Ibn Rushd memilih, menyusun kembali, dan menjelaskannya. Artikel ini tidak menganggap seluruh konsep tersebut sebagai gagasan yang sepenuhnya orisinal dari Ibn Rushd. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana gagasan Plato diolah dan diberi penekanan dalam parafrase Ibn Rushd (Averroes, 1974; Orwin, 2022).

Ibn Rushd menempatkan politik sebagai bagian dari ilmu praktis yang berkaitan dengan tindakan manusia dan pengaturan kehidupan bersama. Politik erat dengan etika karena keputusan pemerintahan memengaruhi perilaku dan kehidupan masyarakat, sehingga pembahasan negara tidak terlepas dari pertanyaan tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan yang baik (Averroes, 1974; Aiat Tazeroulat, 2025; Orwin, 2022). Tujuan kehidupan politik bukan sekadar menjaga stabilitas atau keberlangsungan kekuasaan. Negara harus menciptakan kondisi bagi perkembangan moral dan intelektual masyarakat, sehingga keberhasilan pemerintahan dinilai dari kualitas kehidupan yang dihasilkan, bukan dari kemampuannya mengendalikan masyarakat. Kekuasaan yang hanya melayani kepentingan pribadi atau kelompok penguasa mengabaikan tujuan moral tersebut.

Kepemimpinan dan Keutamaan Intelektual

Kualitas pemimpin merupakan bagian penting dalam parafrase Ibn Rushd terhadap *Republic*. Ia memberi perhatian pada pemimpin yang memiliki kemampuan intelektual dan keutamaan moral, mengikuti pembahasan Plato tentang pemimpin yang memahami tujuan negara dan mengarahkan masyarakat berdasarkan kebijaksanaan (Aiat Tazeroulat, 2025; Averroes, 1974; Orwin, 2022).

Kemampuan intelektual dibutuhkan karena persoalan pemerintahan menuntut analisis keadaan, pertimbangan pilihan, dan penilaian dampak tindakan. Namun kemampuan itu saja tidak cukup. Pemimpin juga harus memiliki keutamaan moral agar pengetahuannya tidak digunakan untuk merugikan masyarakat, sebab kecerdasan tanpa tanggung jawab moral dapat memperkuat dominasi dan kepentingan tertentu. Karena itu, hubungan antara pengetahuan dan kebajikan menjadi unsur penting dalam konsep kepemimpinan Ibn Rushd. Kekuasaan seharusnya menjadi sarana mewujudkan kehidupan yang baik, bukan tujuan yang dipertahankan dengan segala cara.

Melkebeek (2021) menunjukkan bahwa Ibn Rushd mengakui potensi perempuan untuk menjadi penjaga, filsuf, dan pemimpin, tetapi potensi itu tidak berkembang ketika akses pendidikan dibatasi. Poin ini penting bagi argumen artikel. Ia menunjukkan bahwa kapasitas intelektual dalam pembacaan Ibn Rushd tidak sepenuhnya bawaan, melainkan bergantung pada kesempatan untuk mengembangkannya. Konsekuensinya, hierarki kemampuan yang dibahas di bawah tidak dapat dilepaskan dari persoalan akses terhadap pendidikan dan pengetahuan, yang akan dikaji kembali dalam pembahasan tentang batas penyampaian pengetahuan.

Meski demikian, konsep kepemimpinan ini cenderung menempatkan individu dengan kemampuan intelektual tertentu sebagai pihak yang lebih layak menentukan arah pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan pengaruh Plato tentang negara ideal yang memberi peran besar kepada pemimpin filosofis. Penelitian mutakhir menempatkan hubungan antara kebijaksanaan, kualitas pemimpin, dan susunan negara sebagai persoalan sentral dalam memahami pemikiran politik Ibn Rushd (Aiat Tazeroulat, 2025; Orwin, 2022). Dari sudut pandang politik, pengetahuan yang tinggi tidak otomatis memberi hak untuk memerintah tanpa mekanisme pertanggungjawaban. Keutamaan intelektual karenanya perlu dibaca secara kritis agar tidak menjadi pembenar kekuasaan yang tidak terbatas.

Otoritas Pengetahuan dan Kewenangan Penafsiran dalam *The Decisive Treatise*

Filsafat, Hukum Agama, dan Pencarian Kebenaran

Dalam *The Decisive Treatise*, Ibn Rushd membahas hubungan antara filsafat dan hukum agama. Ia berpendapat bahwa hukum agama mendorong manusia untuk memperhatikan dan

memikirkan segala sesuatu yang ada, sehingga mempelajari filsafat dapat dibenarkan, bahkan menjadi kewajiban bagi mereka yang mampu melakukan penyelidikan tersebut (Averroes, 2001).

Dasar pemikirannya adalah bahwa kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran lain. Apabila agama mengajarkan kebenaran dan penalaran filosofis ditempuh dengan benar, keduanya tidak seharusnya saling meniadakan. Jika terdapat perbedaan antara makna lahiriah teks dan hasil penalaran demonstratif, diperlukan penafsiran yang mengikuti kaidah bahasa dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Ibn Rushd tidak menempatkan akal sebagai ancaman terhadap agama, melainkan sebagai sarana memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Omar (2019) membaca *The Decisive Treatise* dalam konteks reformasi politik, sedangkan Soleh dan Rahmawati (2023) serta Taliaferro (2026) membahas hubungan antara hukum agama, penalaran filosofis, dan penafsiran.

Dalam kehidupan politik, pemikiran ini memberi dasar bagi pentingnya pengetahuan dan penalaran: keputusan yang menyangkut masyarakat tidak seharusnya bertumpu pada penerimaan pendapat tanpa proses pertimbangan.

Metode Demonstratif, Dialektis, dan Retoris

Ibn Rushd membedakan tiga metode manusia dalam memperoleh pemahaman dan memberi persetujuan terhadap kebenaran. Metode demonstratif menggunakan pembuktian yang menghasilkan kepastian berdasarkan premis yang benar. Metode dialektis bertumpu pada pendapat atau premis yang diterima dalam perdebatan, sedangkan metode retoris menekankan penyampaian yang persuasif dan mudah dipahami khalayak (Ahsan, 2025; Averroes, 2001; Wahyuddin et al., 2026).

Menurut Ibn Rushd, kemampuan manusia dalam menggunakan metode tersebut berbeda. Sebagian orang mampu memahami melalui pembuktian demonstratif, sedangkan yang lain lebih mudah menerima melalui argumentasi dialektis atau retoris. Gagasan ini menunjukkan adanya hierarki kemampuan intelektual: mereka yang mampu menggunakan penalaran demonstratif dapat membahas persoalan filosofis yang lebih kompleks. Namun, hierarki ini tidak berarti masyarakat umum tidak memiliki jalan menuju kebenaran, sebab hukum agama memiliki metode penyampaian yang menjangkau manusia dengan tingkat kemampuan berbeda.

Persoalan politik muncul ketika perbedaan kapasitas ini dihubungkan dengan kewenangan menentukan pemahaman yang memengaruhi kehidupan bersama. Jika kelompok tertentu dianggap lebih mampu memahami kebenaran, kelompok itu dapat memperoleh pengaruh lebih besar dalam membentuk pandangan sosial dan keagamaan masyarakat. Meski demikian, pembedaan metode dalam *The Decisive Treatise* tidak dapat langsung dibaca sebagai pembagian hak politik. Ibn Rushd membahas cara manusia memperoleh pemahaman, bukan menyusun aturan tentang siapa yang berhak menjadi penguasa. Kaitan antara hierarki pengetahuan dan kewenangan politik merupakan hasil pembacaan interpretatif atas kedua karyanya, bukan pernyataan eksplisit dalam satu karya.

Penafsiran, Khalayak, dan Batas Penyampaian Pengetahuan

Persoalan otoritas menjadi lebih jelas dalam pembahasan tentang penafsiran (*taʾwīl*). Dalam pembacaannya atas QS Ali Imran ayat 7, Ibn Rushd memberi kedudukan penting kepada orang-orang yang mendalam ilmunya dalam memahami makna teks yang memerlukan penafsiran, dan menghubungkan kemampuan itu dengan penalaran demonstratif serta penguasaan ilmu pengetahuan (Averroes, 2001).

Ia juga menjelaskan bahwa penafsiran demonstratif tidak seharusnya disampaikan kepada orang yang belum mampu memahaminya, karena dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perpecahan. Penyampaian pengetahuan perlu memperhatikan metode dan kemampuan penerimanya. Dengan demikian, ada batas dalam penyebaran pengetahuan: kelompok demonstratif memiliki kedudukan khusus dalam memahami penafsiran kompleks, sedangkan masyarakat umum menerima ajaran dalam bentuk yang sesuai dengan kapasitasnya. Wahyuddin et al. (2026) menghubungkan *burhān*, bahasa, *taʾwīl*, dan otoritas epistemik, dan menunjukkan bahwa kewenangan penafsiran berkaitan dengan kemampuan penalaran dan tanggung jawab dalam memahami teks.

Dari sudut pandang politik, pembatasan ini menimbulkan pertanyaan tentang pemerataan akses terhadap pengetahuan. Ketika penafsiran tertentu hanya dapat dipahami kalangan khusus, masyarakat sulit menilai klaim yang dibuat atas dasar pengetahuan itu, sehingga terbentuk ketimpangan posisi antara kelompok yang berwenang secara intelektual dan masyarakat umum. Temuan Melkebeek (2021) memperkuat kekhawatiran ini: bila kapasitas hanya berkembang ketika akses pendidikan tersedia, ketimpangan akses dapat menjadi ketimpangan otoritas.

Pembatasan penyampaian penafsiran teologis perlu dibedakan dari pembatasan kritik politik. Ibn Rushd membahas risiko kesalahpahaman ketika pengetahuan filosofis disampaikan kepada khalayak yang belum siap, bukan merumuskan larangan bagi masyarakat untuk mengkritik penguasa. Pembahasan ini karenanya menunjukkan hierarki akses terhadap pengetahuan, bukan penolakan terhadap seluruh partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik.

Ibn Rushd juga mengkritik al-Ghazali terkait cara penyampaian penafsiran dan penilaian terhadap para filsuf. Kritik ini menunjukkan bahwa persoalan filosofis yang rumit tidak seharusnya diselesaikan dengan penilaian yang mengabaikan metode penalaran, dan bahwa kewenangan intelektual harus disertai tanggung jawab dalam menggunakan pengetahuan (Averroes, 2001; Wahyuddin et al., 2026).

Mempertemukan Kepemimpinan dan Otoritas Penafsiran

Kedua karya memiliki fokus berbeda. *Averroes on Plato's Republic* diarahkan pada negara, kepemimpinan, dan kualitas pemimpin yang memiliki kemampuan intelektual serta moral. *The Decisive Treatise* membahas hubungan filsafat dan hukum agama, termasuk perbedaan kemampuan manusia dalam memahami kebenaran. Keduanya tidak menyusun satu teori politik yang sama, tetapi sama-sama menempatkan pengetahuan sebagai unsur penting dalam kehidupan manusia.

Apabila dibaca bersamaan, muncul hubungan interpretatif antara otoritas intelektual dan kekuasaan politik: pemimpin yang berpengetahuan dianggap lebih mampu memahami tujuan hidup bersama, sedangkan kelompok yang mampu bernalar demonstratif memiliki kedudukan khusus dalam penafsiran. Hubungan ini merupakan hasil sintesis penulis, bukan teori kelembagaan yang dirumuskan Ibn Rushd secara eksplisit. Pembacaan Omar (2019) dan Aiat Tazeroulat (2025) membantu menempatkan hubungan itu dalam konteks reformasi politik dan pengaruh Plato.

Namun, kedua teks belum menjelaskan secara sistematis bagaimana kewenangan pemimpin atau kelompok intelektual dapat diawasi masyarakat. Penekanan pada kebajikan moral dan hukum agama lebih banyak memberi dasar normatif tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan, bukan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan masyarakat menuntut pertanggungjawaban. Pengalaman Ibn Rushd sebagai hakim pun tidak membuktikan bahwa ia mengembangkan gagasan lembaga peradilan independen untuk membatasi penguasa. Hukum sebagai pedoman normatif berbeda dari institusi pengawasan yang mandiri dan berwenang mengoreksi pemerintah.

Kontribusi utama kedua karya karenanya terletak pada penempatan pengetahuan dan kebajikan sebagai dasar kehidupan politik, sementara pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pertanggungjawaban masih memerlukan pengembangan bila dihubungkan dengan sistem politik kontemporer.

Relevansi dan Kritik Pemikiran Ibn Rushd dalam Politik Kontemporer

Keahlian dalam Pengambilan Keputusan Publik

Pemerintah modern menghadapi persoalan yang kompleks, mulai dari ketimpangan ekonomi, pengangguran, pendidikan, kesehatan, hingga perubahan lingkungan. Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan keputusan berdasarkan kepentingan politik jangka pendek, sehingga pemerintah membutuhkan informasi, penelitian, dan pertimbangan dari berbagai bidang keahlian. Pemikiran Ibn Rushd tentang pentingnya pengetahuan relevan di sini: pemimpin tidak cukup memiliki kedudukan politik, tetapi juga perlu memahami persoalan dan menentukan tindakan yang tepat.

Sebagai contoh, kebijakan mengurangi pengangguran memerlukan pemahaman tentang kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, kebutuhan tenaga kerja, dan kemampuan sektor usaha menyerap pekerja. Keputusan yang hanya didasarkan pada popularitas atau kepentingan elektoral berisiko tidak menyelesaikan persoalan secara mendasar. Keahlian dapat meningkatkan kualitas informasi dan pertimbangan, tetapi nasihat ahli juga harus dapat diuji dan diperdebatkan melalui standar bukti yang jelas (Head, 2024; Holst, 2025; Holst & Christensen, 2024).

Relevansi ini tidak berarti setiap keputusan publik diserahkan kepada ahli. Pengetahuan teknis dapat menjelaskan pilihan dan akibatnya, tetapi tidak selalu dapat menentukan pilihan yang paling adil, karena kebijakan publik menyangkut perbedaan nilai, kepentingan, dan pembagian sumber daya yang harus dipertimbangkan secara politik. Keahlian sebaiknya menjadi sumber pertimbangan penting, bukan dasar untuk memberi kekuasaan tanpa pengawasan.

Hierarki Pengetahuan dan Kritik terhadap Guardianship

Gagasan Ibn Rushd tentang perbedaan kapasitas intelektual dapat digunakan untuk membaca persoalan *guardianship* yang dikritik Dahl (1989), yaitu pandangan bahwa kelompok berpengetahuan

lebih tinggi lebih mampu menentukan kepentingan bersama daripada masyarakat. Terdapat kemiripan persoalan antara gagasan tersebut dan implikasi hierarki pengetahuan Ibn Rushd, terutama mengenai kedudukan kelompok yang mampu bernalar demonstratif. Kemiripan ini tidak berarti Ibn Rushd mengusulkan penghilangan hak politik masyarakat, sebab pembahasannya dalam *The Decisive Treatise* terutama menyangkut pemahaman kebenaran dan metode penyampaian pengetahuan.

Namun, ketika gagasan itu dihubungkan dengan kepemimpinan politik, muncul risiko bahwa keunggulan intelektual dijadikan dasar kewenangan yang terlalu besar. Risiko ini perlu dikritisi dengan dua alasan Dahl. Pertama, kepentingan masyarakat tidak dapat ditentukan hanya oleh pengetahuan teknis atau filosofis, karena pengalaman dan kebutuhan orang yang terkena dampak kebijakan merupakan bagian dari pengetahuan tentang kepentingan bersama. Kedua, kelompok yang dianggap paling mengetahui tetap dapat menyalahgunakan kekuasaan. Dalam kerangka Dahl, kemampuan intelektual dapat menjadi dasar masukan, tetapi tidak menghapus kesetaraan politik warga.

Persoalan ini berdekatan dengan debat tentang paternalisme epistemik, yaitu ketika pihak yang mengaku lebih tahu membatasi penilaian atau pilihan pihak lain atas nama kepentingan mereka. Literatur mutakhir mengingatkan bahwa klaim otoritas semacam itu harus diuji dari segi kompetensi, keandalan, dan penghormatan terhadap kemandirian pihak yang terdampak (Croce & Marsili, 2025; Da Silva, 2026; Schmechtig, 2025). Pemimpin berpengetahuan memang dibutuhkan, tetapi masyarakat tetap berhak mengetahui, menilai, dan menyampaikan pandangan atas keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Kualitas pengetahuan perlu berjalan bersama prinsip demokrasi, bukan menggantikannya (Holst & Christensen, 2024).

Akuntabilitas sebagai Batas Kekuasaan

Salah satu keterbatasan pemikiran politik Ibn Rushd adalah belum adanya penjelasan sistematis tentang mekanisme kelembagaan yang memastikan penguasa bertanggung jawab kepada masyarakat. Keutamaan moral dan pengetahuan dapat menjadi standar bagi pemimpin, tetapi tidak menjamin kekuasaan selalu digunakan untuk kepentingan bersama. Dalam demokrasi modern, akuntabilitas diperlukan agar pemegang kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang: pejabat publik menjelaskan keputusannya, menerima penilaian, dan bersedia menghadapi konsekuensi bila terjadi penyimpangan (Brummel & de Blok, 2024; Trautendorfer & Eder, 2025). Berdasarkan tiga dimensi akuntabilitas, terdapat tiga perbedaan yang dapat diidentifikasi.

Akuntabilitas vertikal. Kedua karya tidak merumuskan mekanisme pertanggungjawaban pemimpin melalui pemilu atau pemberhentian oleh masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena pemikiran Ibn Rushd berkembang dalam masyarakat monarki abad pertengahan, ketika legitimasi melalui pemilihan rakyat belum menjadi bagian dari kerangka kelembagaan yang dibahas dalam kedua karya. Dalam demokrasi modern, pemilu menjadi salah satu sarana bagi warga untuk memberi penghargaan atau hukuman politik kepada pejabat (Mechkova et al., 2019).

Akuntabilitas horizontal. Kedua karya juga tidak menjelaskan pembagian kewenangan antarlembaga yang dapat mengawasi dan membatasi penguasa secara independen. Hukum dan kewajiban moral memberi dasar normatif bagi perilaku manusia, tetapi tidak sama dengan pengawasan antarlembaga dalam demokrasi modern (Mechkova et al., 2019; O'Donnell, 1998).

Akuntabilitas sosial. Pembatasan penyampaian penafsiran filosofis menunjukkan perbedaan akses terhadap pengetahuan, tetapi tidak membuktikan bahwa Ibn Rushd menolak keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kekuasaan, karena pembatasan penafsiran teologis berbeda dari pembatasan kritik terhadap pemerintah. Dalam demokrasi kontemporer, masyarakat sipil dan media menjadi bagian penting dari pengawasan terhadap pejabat publik (Mechkova et al., 2019; Smulovitz & Peruzzotti, 2000).

Penelitian kontemporer menegaskan pentingnya dimensi ini. Brummel dan de Blok (2024) menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial dapat meningkatkan persepsi legitimasi lembaga pemerintah ketika warga berkesempatan menuntut pertanggungjawaban. Gratton dan Edenhofer (2025) menunjukkan bahwa pendelegasian keputusan kepada teknokrat menimbulkan ketegangan antara efektivitas kebijakan dan kendali mayoritas demokratis. Trautendorfer dan Eder (2025) memperlihatkan bahwa aturan transparansi tidak selalu membuat warga merasakan keterbukaan. Akuntabilitas dengan demikian perlu diwujudkan melalui keterbukaan informasi dan hubungan pertanggungjawaban yang dapat diakses masyarakat.

Dari ketiga dimensi tersebut, pemikiran Ibn Rushd memberi perhatian pada standar moral dan intelektual penguasa, tetapi belum menyediakan mekanisme kelembagaan yang menjamin

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Perbedaan ini penting karena pemerintahan yang baik tidak hanya bergantung pada kualitas pribadi pemimpin, tetapi juga pada sistem pengawasan yang tetap bekerja ketika pemegang kekuasaan lalai.

Agama, Pengetahuan, dan Alasan Publik

Pemikiran Ibn Rushd tentang keselarasan agama dan filsafat relevan bagi persoalan akuntabilitas karena menyangkut cara kekuasaan dibenarkan. Penggunaan akal dan filsafat tidak ditempatkan sebagai ancaman terhadap agama; keduanya diarahkan pada pencarian kebenaran (Soleh & Rahmawati, 2023; Sugara et al., 2026; Taliaferro, 2026). Pandangan ini dapat menjadi dasar bagi kehidupan politik yang tidak mempertentangkan keyakinan dan pengetahuan secara berlebihan.

Nilai agama dapat memberi pertimbangan moral tentang keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan. Namun, kebijakan yang mengatur masyarakat luas juga harus memiliki alasan yang dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan, karena klaim keagamaan atau klaim pengetahuan yang tidak dapat diuji berisiko menjadi dasar penolakan terhadap kritik. Gagasan Ibn Rushd tidak dapat langsung disamakan dengan sekularisme, sebab ia tetap menempatkan hukum agama sebagai unsur penting masyarakat Muslim. Relevansi yang dapat diambil adalah membangun hubungan antara keyakinan dan penalaran secara bertanggung jawab; dalam masyarakat plural, hal ini perlu dikembangkan melalui prinsip kesetaraan hukum, kebebasan berpendapat, dan penghormatan terhadap perbedaan.

KESIMPULAN

Analisis ini menunjukkan bahwa Ibn Rushd menempatkan pengetahuan dan keutamaan moral sebagai unsur penting dalam kehidupan politik. Melalui *Averroes on Plato's Republic*, ia membahas kepemimpinan yang diarahkan pada tujuan moral kehidupan bersama. Melalui *The Decisive Treatise*, ia menegaskan kedudukan penalaran filosofis dalam memahami hukum agama sekaligus mengakui perbedaan kemampuan manusia melalui metode demonstratif, dialektis, dan retoris. Pembacaan kedua karya secara berdampingan memperlihatkan hubungan interpretatif antara keutamaan intelektual, kepemimpinan, dan kewenangan penafsiran. Hubungan ini merupakan hasil sintesis penulis, bukan teori yang dirumuskan Ibn Rushd secara eksplisit, dan tidak menunjukkan adanya rancangan kelembagaan yang menjamin pertanggungjawaban penguasa kepada masyarakat.

Dalam konteks kontemporer, pemikiran Ibn Rushd membantu menjelaskan pentingnya keahlian dan rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Namun, kritik demokratis mengingatkan bahwa keunggulan pengetahuan tidak dapat menjadi satu-satunya dasar legitimasi kekuasaan. Otoritas ahli perlu disertai partisipasi, transparansi, pengawasan kelembagaan, dan akuntabilitas agar tidak berkembang menjadi kekuasaan yang sulit dikritik.

Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan. Pertama, kajian hanya berfokus pada dua karya yang memiliki tujuan berbeda, sehingga hubungan di antara keduanya perlu diperlakukan sebagai interpretasi. Kedua, analisis atas *Averroes on Plato's Republic* bertumpu pada terjemahan bahasa Inggris yang bersumber dari tradisi teks Ibrani karena naskah Arabnya tidak lagi tersedia, sehingga pilihan penerjemah dan sejarah transmisi teks dapat memengaruhi pembacaan. Ketiga, kerangka *guardianship* dan akuntabilitas demokratis berasal dari teori politik modern. Kerangka ini membantu mengidentifikasi persoalan otoritas dan pertanggungjawaban, tetapi tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Ibn Rushd membahas sistem demokrasi. Penelitian lanjutan dapat memperluas korpus dengan mengkaji karya Ibn Rushd lainnya, termasuk *Bidayat al-Mujtahid*, atau membandingkan pemikirannya dengan al-Farabi dan Ibn Bajja.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari buku:

Averroes. (1974). *Averroes on Plato's Republic* (R. Lerner, Trans.). Cornell University Press.

Averroes. (2001). *The book of the decisive treatise determining the connection between the law and wisdom, and the epistle dedicatory* (C. E. Butterworth, Trans.). Brigham Young University Press.

Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.

Orwin, A. (Ed.). (2022). *Plato's Republic in the Islamic context: New perspectives on Averroes's commentary*. Boydell & Brewer. https://doi.org/10.1017/9781800104983

Referensi dari jurnal ilmiah:

Ahsan, A. (2025). Transcending Ibn Rushd's methods of reasoning. *Asian Philosophy, 35*(3), 236–268. https://doi.org/10.1080/09552367.2024.2403816

Aiat Tazeroulat, R. (2025). Politics between Plato and Ibn Rushd: The presence of Plato in Ibn Rushd's political thought. *Nama Journal of Islamic Sciences and Humanities, 9*(3). https://doi.org/10.59151/nj.v9i3.467

Brummel, L., & de Blok, L. (2024). Do political and social accountability arrangements increase citizens' legitimacy perceptions? A vignette experiment in the Netherlands. *Public Management Review, 26*(11), 3365–3389. https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2337843

Croce, M., & Marsili, N. (2025). Misplaced trust in expertise: Pseudo-experts and unreliable experts. *Social Epistemology, 39*(6), 667–682. https://doi.org/10.1080/02691728.2025.2491104

Da Silva, M. (2026). The epistemic condition on political authority. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/13698230.2026.2675804

Gratton, G., & Edenhofer, J. (2025). The rise and fall of technocratic democracies: Unstable majorities and delegation to technocrats. *Journal of European Public Policy*. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/13501763.2025.2576160

Head, B. W. (2024). Reconsidering expertise for public policymaking: The challenges of contestability. *Australian Journal of Public Administration, 83*(2), 156–172. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12613

Holst, C. (2025). Democratizing expertise: The epistemic approach. *Social Epistemology, 39*(6), 699–715. https://doi.org/10.1080/02691728.2025.2453937

Holst, C., & Christensen, J. (2024). The epistemic quality of expert bodies: From normative-theoretical concept to empirical measurement. *Acta Politica, 59*, 822–846. https://doi.org/10.1057/s41269-023-00312-8

Mechkova, V., Lührmann, A., & Lindberg, S. I. (2019). The accountability sequence: From de-jure to de-facto constraints on governments. *Studies in Comparative International Development, 54*, 40–70. https://doi.org/10.1007/s12116-018-9262-5

Melkebeek, T. (2021). The medieval Islamic commentary on Plato's Republic: Ibn Rushd's perspective on the position and potential of women. *Islamology, 11*(1), 9–23. https://doi.org/10.24848/islmlg.11.1.02

O'Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. *Journal of Democracy, 9*(3), 112–126. https://doi.org/10.1353/jod.1998.0051

Omar, A. (2019). Ibn Rushd's *The Decisive Treatise*: A text for political reform. *The Medieval History Journal, 22*(1), 131–155. https://doi.org/10.1177/0971945818801398

Schmechtig, P. (2025). Epistemic paternalism and protective authority in a non-ideal world. *Social Epistemology, 39*(6), 683–698. https://doi.org/10.1080/02691728.2025.2453942

Siraj, F. M., & Mohd Nor, M. R. (2020). The concept of al-Jumhuriyah wa al-Ahkam in political philosophy of Ibn Rushd. *Religia, 23*(2), 236–250. https://doi.org/10.28918/religia.v23i2.2363

Smulovitz, C., & Peruzzotti, E. (2000). Societal accountability in Latin America. *Journal of Democracy, 11*(4), 147–158. https://doi.org/10.1353/jod.2000.0087

Soleh, A. K., & Rahmawati, E. S. (2023). The strength of Ibn Rushd's integration of religion and philosophy: An Islamic historical discourse. *Journal of Al-Tamaddun, 18*(2), 173–187. https://mojc.um.edu.my/index.php/JAT/article/view/34884

Sugara, R. R., Masykur, M., Gufron, I. A., & Wasehudin. (2026). The relationship between religion and politics in Ibn Rushd's philosophy. *Aqlania, 17*(1), 67–80. https://doi.org/10.32678/aqlania.v17i1.231

Taliaferro, K. (2026). Between the divine law and human wisdom: Sharʿ, sharīʿa, and notes toward a new interpretation of Ibn Rushd's *Faṣl al-maqāl* and *al-Kashf ʿan manāhij*. *Journal of Islamic Studies, 37*(3), 399–427. https://doi.org/10.1093/jis/etag001

Trautendorfer, J., & Eder, N. (2025). Does transparency reach citizens? National accountability mechanisms and public perceptions in Europe. *Governance, 38*(4), Article e70041. https://doi.org/10.1111/gove.70041

Wahyuddin, I., Utomo, A. H., Kuswanjono, A., & Syamsuddin, M. M. (2026). Burhān, language, taʾwīl, and epistemic authority: Interdependent conditions of interpretive legitimacy in Ibn Rushd's

theory of Qur'anic interpretation. Tsaqafah, 22(2), 302–330. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v22i2.132

Referensi dari kamus/ensiklopedia – daring:

Ben Ahmed, F., & Pasnau, R. (2025). Ibn Rushd [Averroes]. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2025 ed.). https://plato.stanford.edu/archives/spr2025/entries/ibn-rushd/